



GAPKI

KALIMANTAN BARAT



Menimba Fakta Tahun 2015
Memacu Spirit Tahun 2016



GAPKI

KALIMANTAN BARAT

buletin edisi # Januari-Februari 2016

KONTEN :

3 Abstrak :
Menimba Fakta Tahun 2015,
Memacu Spirit Di Tahun 2016

Mencegah Kebakaran Hutan, Lahan
dan Kebun di tahun 2016 4

8 Trend Harga CPO ditengah Gonjang
Ganjing Ekonomi Global yang
Masih Lesu

REFERENSI :
Upaya Pencegahan
Kebakaran Hutan di INDONESIA 12



Penanggung Jawab

Ketua GAPKI Cabang Kalbar

Tim Pengarah

**Ketua Harian dan Para Wakil
Ketua GAPKI Cabang Kalbar**

Pemimpin Redaksi

Sekretaris GAPKI Cabang Kalbar

Redaksi Pelaksana & Peliputan

Pelaksana Harian Sekretariat GAPKI Cabang Kalbar

Nara Sumber

**Dewan Pembina, Ketua Cabang,
Ketua Harian, Para Wakil Ketua,
Ketua Bidang, Koordinator Wilayah,
Perusahaan Anggota
& Pihak berkompeten lainnya.**

Design Grafis & Layout

ARV Media

Alamat Redaksi

**Jl. St. Abdurrachman no 11 Pontianak
Email ; sekretariat@gapki-kalbar.or.id**



MENIMBA FAKTA TAHUN 2015 MEMACU SPIRIT TAHUN 2016

Tidak dapat dipungkiri, prospek industri kelapa sawit kini semakin cerah baik di pasar dalam negeri maupun di pasar dunia. Sektor ini akan semakin strategis karena berpeluang besar untuk lebih berperan menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional dan menyerap tenaga.

Sebagai komoditi utama Nasional, Perkebunan Kelapa sawit di Kalimantan Barat sampai dengan akhir tahun 2015 telah mencapai 1.312.517 Ha dengan produksi sekitar 1.174.499 ton dari sekitar 717.703 ha tanaman produktif. (sumber data Disbun Kalbar)

Beberapa catatan sepanjang tahun 2015 yang tersimpan dimeja redaksi merupakan fakta penting yang dapat dijadikan bahan untuk

memantapkan langkah menuju tahun 2016 antara lain; fluktuasi Harga CPO yang berimbas kepada penerimaan pelaku usaha agribisnis kelapa sawit maupun petani plasma; berulangnya kebakaran hutan lahan dan kebun yang berdampak terganggunya roda perekonomian daerah, gangguan kesehatan publik, bahkan upaya mengantisipasi maupun menanggulangi musibah kebakaran kebun di tahun 2015 memerlukan perhatian dan kerjasama yang solid baik dengan stakeholders terkait maupun dengan masyarakat sekitar.

Menelisk berbagai fakta diatas dikaitkan dengan proyeksi kondisi agroindustri sawit dikalbar di tahun 2016, tim redaksi mencoba merangkum dan menyajikannya dalam bulletin edisi kali ini dengan tema **"Menimba Fakta Tahun 2015 Memacu Spirit di Tahun 2016"**

Semoga bermanfaat
Salam,
Tim Redaksi

MENCEGAH BERULANGNYA

KEBAKARAN HUTAN, LAHAN DAN KEBUN *DI TAHUN* 2016

Jika dibuat survei, mungkin hampir sebagian besar masyarakat Indonesia setuju dengan kesimpulan bahwa kasus kebakaran hutan tahun 2015 kemarin adalah bencana alam dengan skala terburuk sejak kejadian tsunami Aceh tahun 2004 silam. Catatan dari BNPB menunjukkan, kerusakan yang disebabkan oleh kasus kebakaran hutan tahun 2015 lalu telah menyebabkan 24 orang tewas akibat kebakaran hutan, 600.000 jiwa menderita infeksi saluran pernapasan dan 2,61 juta hektar lahan terbakar. Kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan tahun ini pun mencapai Rp 221 triliun dan wilayah yang paling banyak mengalaminya adalah Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan Papua.

Bencana kebakaran yang melanda sebagian lahan perkebunan sawit pada akhir tahun 2015 dianggap sangat merugikan para pelaku bisnis yang bergerak di sektor tersebut. Ketua umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono, mengatakan bencana kebakaran yang ada sekarang merugikan semua pelaku usaha di sektor sawit baik langsung ataupun tidak langsung.

Kerugian paling besar yang diderita pelaku usaha adalah intangible loss saat muncul tuduhan kepada perusahaan sawit sebagai penyebab utama kebakaran. Padahal, perusahaan-perusahaan sawit yang mengelola lahan perkebunan itu sudah memenuhi standar operasi untuk mencegah dan memadamkan kebakaran.

"Investasi juga cukup besar dikeluarkan untuk memenuhi SOP penanganan dan peralatan kebakaran," tegas Ketua umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono, di Jakarta, Senin (21/9).

Diungkapkannya, perusahaan yang memiliki izin pengelolaan lahan sudah lama menerapkan standar zero burning sesuai amanat UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup dan UU Nomor 39 Tahun 2013 tentang perkebunan.

"Tuntutan zero burning makin menguat sejalan dengan tuntutan pasar, terutama dari buyer internasional. Selama ini perusahaan yang terkena dampak kebakaran harus berusaha memadamkan, baik dengan kekuatan sendiri atau bantuan pihak lain. Seharusnya aksi perusahaan-perusahaan ini diapresiasi, bukan malah dihukum," tegasnya. Diharapkannya, dalam melihat pembakaran pemerintah juga mengedukasi masyarakat, karena di lapangan masih terjadi pembakaran oleh petani yang ingin membuka ladang pertanian.



Joko menuturkan, ini praktik ratusan tahun dan turun temurun. Makanya melalui UU 32/2009, pembukaan lahan dengan membakar oleh petani dianggap sebagai kearifan lokal dan dibolehkan hingga luas 2 hektare.

PP 4/2001 juga menegaskan kalau petani membakar untuk buka ladang tidak boleh dipadamkan kecuali sudah ke luar ladangnya. Ini semua juga menjadi pemicu meluasnya kebakaran disamping unsur ketidaksengajaan lainnya yang juga bisa menjadi penyebab kebakaran.

Kebakaran lahan saat ini banyak didominasi diluar konsesi (54 persen), 41 persen pada konsesi pulp and paper, dan 1 persen pada konsesi logging. Di Sumatera, ada lebih dari 50 persen kebakaran terjadi di luar konsesi perusahaan dan di Kalimantan angka ini lebih besar, 70 persen.

Sejak kebakaran hutan yang cukup besar yang terjadi pada tahun 1982/83 yang kemudian diikuti rentetan kebakaran hutan beberapa tahun berikutnya, sebenarnya telah dilaksanakan beberapa langkah, baik bersifat antisipatif (pencegahan) maupun penanggulangannya.

Kalimantan Barat sebagai salah satu provinsi yang tidak luput dari musibah kebakaran hutan lahan dan kebun sepanjang tahun 2015 yang merupakan kejadian tahunan yang sulit dielakkan.

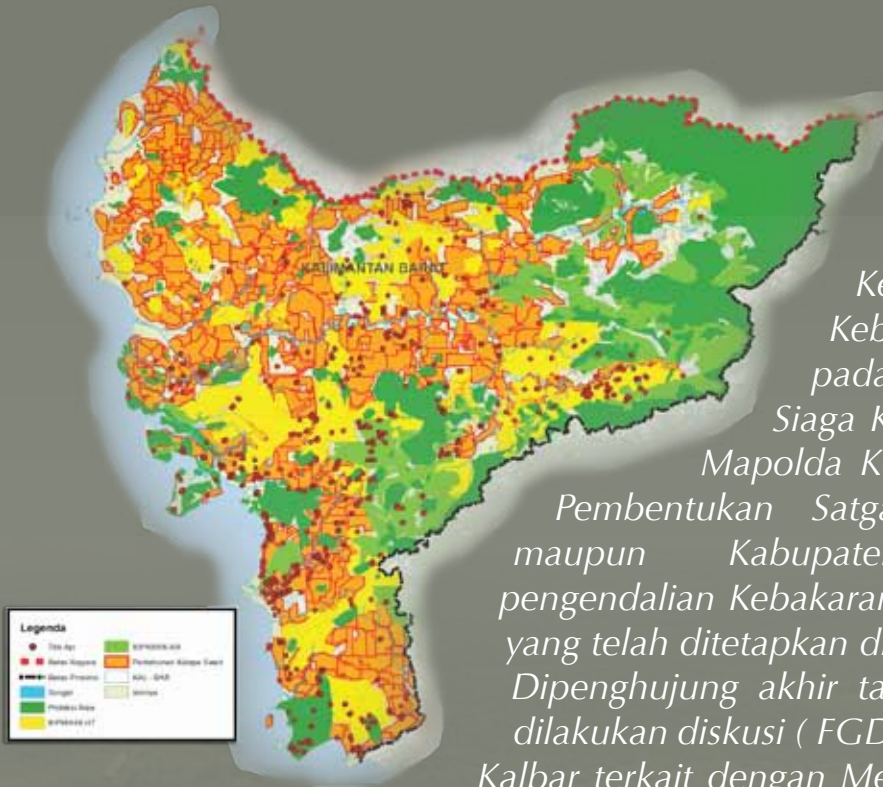
Tercatat sebaran titik panas (hot spot) di Kalbar dimulai pada bulan juli terdapat 254 titik panas,dengan konsentrasi titik panas (TP) berada di Kabupaten Kubu Raya 38 TP, Kabupaten Sanggau 29 TP, Sintang 45 TP, dan 142 TP tersebar di beberapa kabupaten lain; bulan Agustus terdapat 997 titik panas, tersebar di Kabupaten Sanggau 94 TP, Kabupaten Sintang 357 TP, Kabupaten

Ketapang 156 TP, Kabupaten Sekadau 95 TP, Melawi 183 TP, Kapuas Hulu sebanyak 48 TP dan 64 TP tersebar di beberapa kabupaten lain, Pada bulan September tercatat 1011 titik panas dengan sebaran lokasi di Kabupaten Kubu Raya 60 TP, Sanggau 30 TP, Sintang 310 TP, Ketapang 391 TP, Sekadau 80 TP, dan Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 53 TP dan 93 TP tersebar di beberapa kabupaten lain. Sedangkan bulan Oktober masih tersisa 123 titik panas dengan konsentrasi di Kabupaten Ketapang 105 titik panas, 18 TP berada di Kabupaten lain.

sebaran titik api di Provinsi Kalimantan Barat

1-6 September 2015

(sumber : eyesontheforest.or.id)



Upaya konsolidasi pencegahan Kebakaran Hutan Lahan dan Kebun di Kalbar sudah dimulai pada awal tahun 2015 melalui Apel Siaga Kebakaran Hutan Dan Lahan di Mapolda Kalbar pada Bulan Maret 2015, Pembentukan Satgas Karhutla Tingkat Provinsi maupun Kabupaten, Penyiapan peralatan pengendalian Kebakaran Lahan / Kebun sesuai standar yang telah ditetapkan di masing-masing perkebunan, Dipenghujung akhir tahun 2015 (Oktober 2015), dilakukan diskusi (FGD) dibawah koordinasi Mapolda Kalbar terkait dengan Mencari Akar Masalah dan Solusi Pananggulangan Kebakaran Hutan , Lahan dan Kebun .

Hasil Diskusi setidaknya menghasilkan beberapa rumusan antara lain;

1. Potensi Rawan Kebakaran Hutan, Lahan dan Kebun terutama pada daerah Gambut, Kegiatan Pembukaan Ladang (berpindah), Land Clearing pada lahan perkebunan Besar maupun Perkebunan Rakyat
2. Tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk mengantisipasi, menanggulangi kebakaran Hutan, Lahan dan Kebun masih sangat rendah.
3. Sinergi Instansi terkait / Lintas Fungsi dalam penanganan Kebakaran Hutan, Lahan dan Kebun belum Optimal.
4. Lemahnya penegakan hukum bagi pelaku pembakaran Hutan, lahan dan kebun.
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 mengenai kearifan lokal dimana bagi masyarakat diberikan toleransi melakukan pembakaran lahan maksimal 2 Ha, hal ini tidak sejalan dengan peraturan perundangan lainnya (Undang-Undang mengenai Perkebunan maupun permen mengenai kehutanan), sehingga tidak dimungkinkan melakukan penindakan hukum terhadap pelaku pembakaran jika merujuk kepada UU dimaksud.
6. Tidak tersedia air yang cukup dilapangan pada saat diperlukan untuk pengendalian kebakaran.
7. Ketersediaan Sarana Prasarana Pengendalian kebakaran terbatas
8. Akses menuju titik lokasi kejadian kebakaran sulit.

Potensi berulangnya kebakaran Hutan lahan dan kebun di tahun 2016 memerlukan antisipasi yang lebih matang lagi dengan bekal pengalaman selama menangani Karhutla ditahun 2015

Hasil Diskusi juga mengusulkan beberapa rekomendasi antara lain;

1. Petakan Desa rawan kebakaran per Kecamatan dan Kabupaten dengan merujuk data kebakaran 5 tahun terakhir.
2. Inventarsasi rencana pembukaan lahan tahun 2016 baik oleh masyarakat maupun perusahaan perkebunan, perusahaan HTI.
3. Pembentukan Kelompok / Satgas Peduli Api pada desa-desa rawan kebakaran (1 desa dimungkinkan membentuk lebih dari satu kelompok sesuai kebutuhan)
4. Melakukan Pembinaan / pelatihan sitim monitoring, pencegahan, dan pengendalian kebakaran, pada desa rawan kebakaran.
5. Pengadaan Sarana Prasana Pengendalian Kebakaran pada masing-desa rawan kebakaran disesuaikan dengan kebutuhan
6. Pembuatan embung dan kanal blok daerah rawan kebakaran berdasarkan hasil identifikasi lokasi yang sesuai.
7. Melakukan opname kesiapan /kelayakan sapras yang tersedia di lokasi perkebunan besar/ perusahaan HTI
8. Melakukan pelatihan dan sosialisasi mengenai langkah-langkah antisipasi, pengendalian dan sistim monitoring/pelaporan kebakaran lahan, hutan dan kebun.
9. Meningkatkan sinergi lintas fungsi tingkat lapangan, s/d tingkat provinsi melalui pertemuan berkala serta memperjelas peran/fungsi masing-masing dalam satu sistim pencegahan dan pengendalian kebakaran secara terpadu.

Mengutip dari pemberitaan Berita satu, one map policy atau kebijakan satu peta adalah bentuk dari kebijakan yang menyamakan rujukan peta. Jadi pemerintah bersama dengan masyarakat bisa menentukan secara pasti wilayah yang terbakar, untuk kemudian dilakukan penindakan dan antisipasi.

Sistem one map policy ini menjadi urgen untuk mengurai berbagai kepentingan agraris kedalam satu persepsi dan tujuan pemanfaatan lahan yang optimal.





Trend Harga CPO ditengah Gonjang Ganjing Ekonomi Global yang Masih Lesu

Permintaan global yang lesu menyebabkan harga minyak sawit atau crude palm oil (CPO) melemah.

Minimnya sentimen positif membuat harga minyak sawit diprediksi bakal kembali merosot.

Mengutip Analisis perkebunan PT Koneksi Kapital Alfred Nainggolan pada bisnis.com (27/1/16), menilai saham emiten sawit masih akan bearish seiring anjloknya harga minyak dunia ke kisaran US\$28-30/barel yang menyeret harga CPO ke kisaran US\$550 per metrik ton.

Kendati diproyeksi naik ke kisaran US\$600 per metrik ton, Alfred menilai tingkat harga CPO itu masih terbilang murah. Dengan tingkat harga tersebut, emiten sawit akan sangat sensitif terhadap fluktuasi biaya produksi.

"Outlook-nya masih sulit. Akan menarik kalau harga CPO US\$750-800 per metrik ton. Marginnya akan bagus,"

Di masa bearish ini, emiten sawit dapat menggenjot produksi agar penjualan

meningkat. Namun, strategi itu berisiko menyebabkan oversupply CPO yang justru dapat menekan harga.

"Infrastruktur pemerintah bisa mendorong efisiensi ongkos produksi perusahaan sawit. Tapi kalau tidak, marginnya bisa semakin mengecil," pungkasnya.

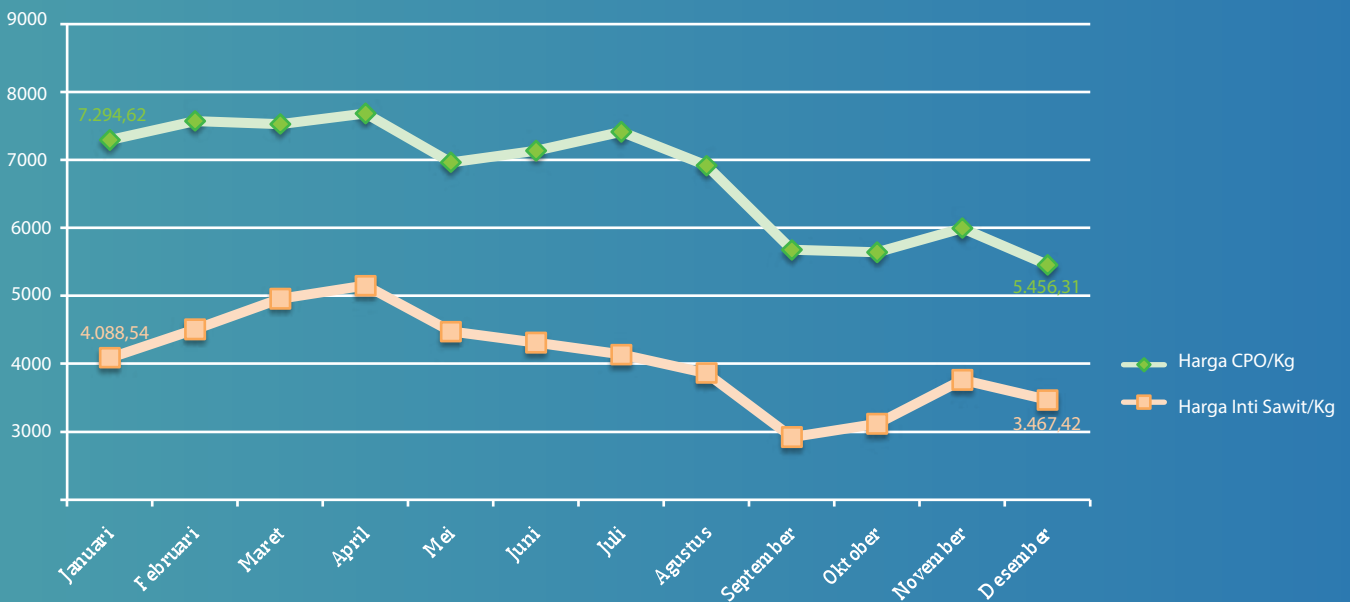
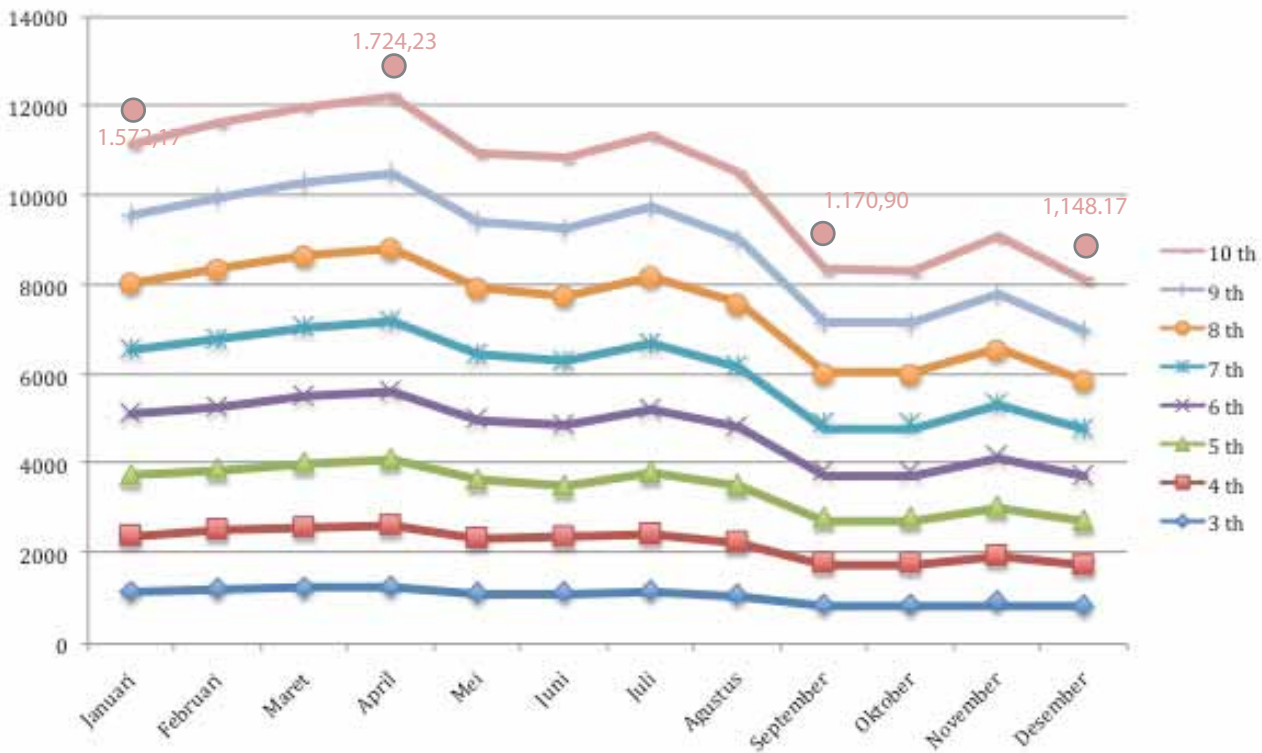
Sebagai konsumen terbesar CPO, melambatnya perekonomian China membuat harga komoditas perkebunan ini masih loyo. Harga CPO diproyeksi belum akan pulih apabila perekonomian China masih melambat.

Namun, emiten sawit yang berorientasi pasar domestik dinilai memiliki prospek bisnis yang lebih positif. Pasalnya, konsumsi dalam negeri cenderung meningkat seiring pembangunan infrastruktur dan penurunan harga BBM.

Dalam laporan Outlook Pasar Komoditas 2016, Bank Dunia memproyeksikan harga CPO akan merangkak naik pada 2016-2020, yakni US\$600 pada 2016, US\$619 pada 2017, US\$640 pada 2018, US\$660 pada 2019, dan US\$682 per metrik ton pada 2020.

Fenomena pergerakan harga CPO dipasar global tentunya akan berdampak bagi penerimaan Tandan Buah Segar (TBS) ditingkat kebun. Sepanjang tahun 2015 harga TBS/Kg yang ditetapkan oleh Tim penetapan Harga TBS Sawit di Kalimantan Barat (untuk umur tanaman diatas 10 tahun) pada bulan Januari 2015 pada posisi Rp 1.572,17, harga TBS merangkak naik secara lambat sampai ketitik puncak di bulan April 2015 yaitu sebesar Rp. 1.724,23 dan kembali melorot hingga titik harga terendah pada bulan September 2015 yaitu Rp. 1.170,90

Perkembangan Harga TBS,CPO dan Inti Sawit Kalimantan Barat
Periode Tahun 2015



Menurut Ir. Pandapotan Girsang, M.Si (Ketua Gapki Cabang Kalbar) pada diskusi dengan Tema *“Membangun Industri Kelapa Sawit Yang Berkelanjutan, Berdaya Saing dan Mensejahterakan”* pada bulan September 2015 di Pontianak, Ada beberapa *“Kiat”* strategis dalam mempertahankan profitabilitas ditengah pelemahan harga CPO akhir-akhir ini antara lain berupaya menekan biaya produksi (effisien) dan menghasilkan produk yang maksimal baik mutu maupun kuantitas.

Dalam implementasinya dapat diwujudkan melalui pelayanan prima terhadap pelanggan, dukungan sumber daya manusia yang handal, tersedia teknologi, peralatan yang tepat guna dan tidak kalah pentingnya adalah kebersamaan sesama pelaku usaha dalam menyikapi pasar.



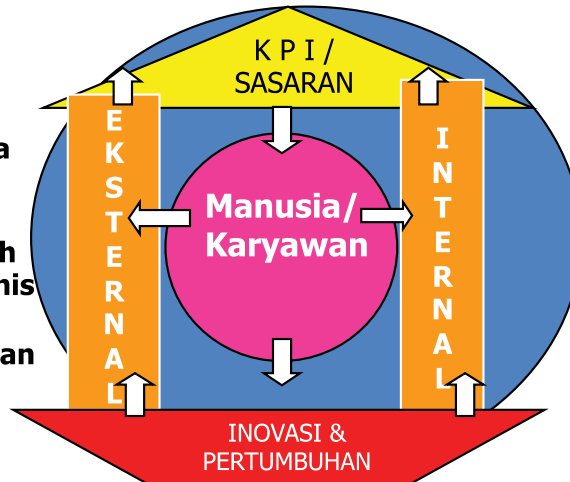
Disisi lain perlu secara bersama sama menyikapi Permasalahan Strategis baik secara internal maupun eksternal yang berpotensi mempengaruhi kinerja sebagaimana di ilustrasikan berikut ini;

PERMASALAHAN STRATEGIS

The Business Success Model

External Environment

- Peraturan Pemerintah :
 - Pajak Ekspor (Bea Keluar)
 - RSPO
- Era Otonomi Daerah
- Pesaing Baru/Sejenis
- Era Globalisasi
- Konflik Sosial dengan Masyarakat



Internal Capabilities

- Birokrasi Organisasi
- Pelimpahan Kewenangan
- Komposisi Umur Tanaman
- Kualitas Infrastruktur (Jalan dan Pabrik)
- Talangan Kredit Petani
- Kompetensi SDM
- Transformasional Leadership



Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Lahan/Kebun yang Wajib dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan

(Surat Gubernur Kalbar No.525/0610/Ekbang-A. Tanggal 25 Februari 2010)

Nama Alat	Luas (Ha)			
1. Peralatan Utama				
A. Peralatan Tangan	>_500 Ha	501-1.000 Ha	1.001-10.000 Ha	>10.000
1. Kopyok Api	3 buah	6 buah	18 buah	90 buah
2. Kapak dua fungsi (Puslaki)	1 buah	2 buah	6 buah	30 buah
3. Garu Tajam (Fire Rake)	2 buah	4 buah	12 buah	60 buah
4. Garu Cangkul (McLeod Rake)	2 buah	4 buah	12 buah	60 buah
5. Sekop (Shovel)	1 buah	2 buah	6 buah	30 buah
6. Pompa Punggung (black pump)	2 buah	4 buah	12 buah	60 buah
7. Chain Saw	1 buah	2 buah	6 buah	30 buah
8. Sumbut (Suntikan Gambut)	1 buah	2 buah	6 buah	30 buah
B. Pompa Air Bertekanan Tinggi	>_500 Ha	501-1.000 Ha	1.001-10.000 Ha	>10.000
1. Pompa Induk (45.6 kw)+tool box	1 roll	1 roll	3 roll	15 roll
2. Slang pompa induk (2,5"/100m)	6 roll	6 roll	18 roll	90 roll
3. Slang pompa induk (1,5"/100m)	6 roll	6 roll	18 roll	90 roll
4. Nozzle 1,5" Task Force (TFT)	4 buah	4 buah	12 buah	60 buah
5. Cabang "Y" 2,5" – 1,5"	2 set	2 set	6 set	30 set
6. Pompa jinjing 11 kw + tool box	1 set	1 set	3 set	15 set
7. Selang Pompa Jinjing	4 roll	4 roll	12 roll	60 roll
8. Tangki air portable kap.50001	1 Unit	1 Unit	3 Unit	15 Unit
9. Tangki air portable kap.80001	2 Unit	2 Unit	6 Unit	30 Unit
C. Transportasi	>_500 Ha	501-1.000 Ha	1.001-10.000 Ha	>10.000
1. Truk Angkut Personil	-	-	3 buah	3 buah
2. Mobil Pick up 4 WD	1 buah	1 buah	3 buah	3 buah
D. Komunikasi	>_500 Ha	501-1.000 Ha	1.001-10.000 Ha	>10.000
1. Radio genggam (HT)	3 buah	3 buah	9 buah	9 buah
2. Radio RIG	1 buah	1 buah	3 buah	3 buah
3. Megaphone	1 buah	1 buah	6 buah	6 buah
4. Pluit	1 buah	1 buah	6 buah	6 buah
E. Logistik	>_500 Ha	501-1.000 Ha	1.001-10.000 Ha	>10.000
1. Kotak P3K	1 set	3 set	3 set	15 set
2. Terpal Tenda	1 buah	1 buah	3 buah	15 buah
3. Tandu	1 buah	1 buah	3 buah	15 buah
4. Air minum,snack dan makanan	pm	pm	pm	pm
F. Kelengkapan Personil	>_500 Ha	501-1.000 Ha	1.001-10.000 Ha	>10.000
1. Helm	10 buah	15 buah	45 buah	225 bh
2. Baju wear Pack	10 buah	15 buah	45 buah	225 bh
3. Sarung Tangan Kulit	3 buah	6 buah	18 buah	90 buah
4. Head Lamp	3 buah	11 buah	23 buah	165 bh
5. Sepatu PMK	10 psng	15 pasng	45 psng	225 psg
6. Masker PMK	10 buah	15 buah	45 buah	225 bh
7. Goggles	10 buah	15 buah	45 buah	225 bh
8. Kopel Rim	10 buah	15 buah	45 buah	225 bh
9. Slayer (Kain penutup mulut & leher	10 buah	15 buah	45 buah	225 bh
2. Peralatan Deteksi Dini				
A. Menara Api	>_500 Ha	501-1.000 Ha	1.001-10.000 Ha	>10.000
1. Alidade	-	1 buah	5-10 buah	>10 buah
2. Teropong Binokular	-	1 buah	5-10 buah	>10 buah
3. Radio RIG	-	1 buah	5-10 buah	>10 buah
4. Senter	-	1 buah	5-10 buah	>10 buah
5. Peta wilayah kerja	1 buah	1 buah	5-10 buah	>10 buah
6. Logistik (Perlengkapan+makan/minum)	pm	pm	pm	pm
7. Jam dinding	-	1 buah	5-10 buah	>10 buah
8. Kelender	-	1 buah	5-10 buah	>10 buah
9. Jadwal Jaga/piket	-	1 buah	5-10 buah	>10 buah
10. Buku kerja/alat tulis	-	1 buah	5-10 buah	>10 buah
11. Instalasi anti petir	-	1 buah	5-10 buah	>10 buah
B. Patroli	>_500 Ha	501-1.000 Ha	1.001-10.000 Ha	>10.000
1. Sepeda Motor	-	2 unit	6 unit	10 unit
2. HT	-	2 unit	6 unit	10 unit
3. Parang/Golok	-	2 buah	6 buah	10 buah
4. Backpack pump	-	-	6 buah	10 buah
5. Velplest	-	2 buah	6 buah	10 buah
6. Senter	-	2 buah	6 buah	10 buah
7. Peta wilayah kerja Peng.Kebakaran	-	1 set	1 set	1 set
3. Peralatan/Perlengkapan PUSDAL				
Nama Alat	>_500 Ha	501-1.000 Ha	1.001-10.000 Ha	>10.000
1. Apar	-	1 buah	3 buah	10 buah
2. Radio RIG/Antena	-	2 buah	6 buah	10 buah
3. Global Positioning System (GPS)	-	1 unit	3 unit	10 unit
4. Alarm/sirine	-	2 unit	6 unit	10 unit
5. Kompas	-	1 unit	3 unit	10 unit
6. Jam Dinding	-	1 unit	1 unit	1 unit
7. Kelender	-	1 buah	1 buah	1 buah
8. Jadwal Jaga/Piket	-	1 buah	1 buah	1 buah
9. No. Telp penting (Manggala Agni, Puskesmas dll)	-	1 buah	1 buah	1 buah
10. Kotak P3K	-	1 buah	1 buah	1 buah
11. Logistik(Perlengkapan+makan/minum)	pm	pm	pm	pm
12. ATK	-	1 buah	3 buah	15 buah
4. Peralatan Pendukung				
Nama Alat	>_500 Ha	501-1.000 Ha	1.001-10.000 Ha	>10.000
1. Farm Traktor + Trailer	-	-	1 Unit	5 Unit
2. Buldozer	-	-	1 Unit	5 Unit